



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PARIWISATA  
KOMISI X DPR RI  
KE KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA  
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021  
26 S.D. 28 MARET 2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Kunjungan Kerja**

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.
11. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021.

**B. Maksud dan Tujuan**

Kunjungan kerja spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, serta mendapatkan data-data faktual dan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah dan masyarakat di Pulau Samosir Kawasan Danau Toba Sumatera Utara, terkait perkembangan kebijakan Pemerintah, khususnya dalam infrastruktur wisata, promosi wisata, dll., hingga kemungkinan bencana alam terhadap pariwisata di destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba Sumatera Utara.

Sementara tujuan khusus kunjungan kerja ini adalah:

1. Menggali dan menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan bidang pariwisata di daerah, dan mendapatkan masukan berupa data-data faktual

dan berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan pariwisata selama pandemi covid19

2. Melakukan pemetaan persoalan yang ada di daerah, khususnya terkait kebijakan pemulihan pariwisata di Kabupaten Samosir.
3. Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memiliki basis data pemulihan pariwisata dan upaya pengembangan potensi pariwisata di wilayah destinasi superprioritas.

### **C. Agenda Kunjungan Kerja**

Agenda dalam kunjungan kerja spesifik bidang pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Samosir ini dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahudin Uno didampingi jajaran Kemenparekraf, dan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pertemuan dengan:
  - a. Plh Bupati Samosir.
  - b. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Samosir.
  - c. Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir.
  - d. Forkompinda Kabupaten Samosir.
  - e. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
  - f. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir.
  - g. Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Danau Toba.
  - h. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Samosir.
  - i. Perwakilan komunitas UMKM di Kabupaten Samosir.
  - j. Tokoh Masyarakat Kab Samosir.
  - k. Organisasi/lembaga bidang pariwisata di Provinsi Sumatera Utara, antara lain: Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Agen Tour dan Travel Indonesia (ASITA), Generasi Pesona Indonesia (GenPI).
2. Tinjauan lapangan destinasi wisata Pulau Samosir yang berada dalam kawasan destinasi superprioritas Danau Toba.

### **D. Susunan Tim Kunjungan Kerja**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Samosir dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol. dengan di dampingi oleh Pejabat Mitra Kerja Komisi X DPR RI dari Kemenparekraf/Baparekraf RI yaitu Henky Hotma Parindungan Manurung, A.Par selaku Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf/Baparekraf RI, Drs. Reza Fahlevi, M.Si selaku Direktur Bidang Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf RI, dan Ni Wayan Giri Adnyani selaku Sekretaris Menparekraf/Baparekraf RI. Selain itu, tim ini juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

## **II. ISI LAPORAN**

### **A. Identifikasi Data dan Informasi**

#### **1. Regulasi**

Terbitnya regulasi-regulasi selama pandemi Covid-19 dan dikeluarkannya kebijakan adaptasi kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE, melahirkan *trust/* kepercayaan pengunjung

untuk berwisata ke Kabupaten Samosir. Hal ini dapat tergambar dari 3 tahapan kondisi penanganan Covid-19 yaitu Kondisi tanggap darurat dimulai pada bulan April 2020 dengan melakukan penutupan objek wisata/ usaha pariwisata, pembatasan sosial pengunjung luar masuk ke Kabupaten Samosir, Kondisi adaptasi, yaitu pada bulan Mei 2020 dengan melakukan perumusan adaptasi normal baru bagi pelaku usaha dan industri kepariwisataan, melakukan berbagai persiapan menuju proses pemulihan dengan konsep CHSE (*clean, healthy, safety* dan *environmental*), Penerbitan *Standard Operational Procedure* (SOP) Kepariwisataan, Kondisi pemulihan, yaitu sejak tanggal 31 Juli 2020, dengan diperbolehkannya membuka usaha pariwisata dengan penerapan protokol kesehatan, signifikan mengembalikan kembali pengunjung untuk berlibur ke Samosir. Misalnya saja, pada triwulan kedua (April-Juni 2020) jumlah wisatawan ke Samosir adalah kosong sementara pada saat dibuka pada awal triwulan ke 3 (Juli-September 2020) jumlah kunjungan mencapai angka 42.103, hal ini tentunya karena penerapan CHSE dan kampanye CHSE oleh para pemangku kepentingan pariwisata membangun *trust* pengunjung untuk berkunjung ke Samosir.

## 2. Target

Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020 berada pada angka 405.203, dengan rincian 402.295 kunjungan domestik dan 2.908 kunjungan wisatawan mancanegara. Pada Tahun 2021 ditargetkan mencapai angka 500.000 kunjungan, tentunya 95% masih berharap kepada pengunjung domestik. Dengan dibukanya objek-objek wisata baru berbasis masyarakat, penguatan amenities, perbaikan infrastruktur jalan, kampanye CHSE dan sertifikasi CHSE, *hotdeals* kepada wisatawan terlebih *family tour* tentunya dengan pelayanan prima (*service excellent*) oleh seluruh pelaku usaha pariwisata diharapkan dapat memenuhi target tersebut.

## 3. SDM

Perencanaan, bentuk, dan metode penyiapan dan kesiapan SDM dengan cara:

- a. Melaksanakan persiapan sosialisasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *new normal* kepariwisataan,
- b. Melaksanakan sosialisasi *new normal* kepariwisataan,
- c. Memonitor pelaksanaan pra sosialisasi *new normal* kepariwisataan,
- d. Memberikan pelatihan pemandu wisatawan kepada para pelaku pariwisata yang terdampak sebagai bentuk kesiapan menuju pembukaan aktifitas pariwisata,
- e. Melaksanakan vokasi, sosialisasi pembentukan kelompok sadar wisata dalam rangka peranan masyarakat sadar wisata dalam kesiapan dan keikutsertaan dalam pembukaan aktifitas pariwisata.

## 4. Infrastruktur

Kondisi kualitas dan kuantitas infrastruktur dikawasan objek wisata masih kurang memadai. Terdapat beberapa objek wisata yang akses jalan menuju Kawasan Destinasi Wisata masih kurang baik (belum dibenahi)

dan juga sarana pengadaan air bersih yang belum tersedia serta infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai.

**5. Pendanaan.**

Adapun pendanaan ideal yang dibutuhkan dari beberapa sisi, diantaranya;

- a. Sisi SDM: APBN: Rp. 1.500.000.000, APBD: Rp. 400.000.000
- b. Sisi Destinasi: APBN: Rp. 1.000.000.000, APBD: Rp. 100.000.000
- c. Sisi Promosi: APBN: Rp. 3.000.000.000, APBD: Rp. 5.000.000.000
- d. Sisi infrastruktur: APBN: Rp. 24.700.000.000, APBD: Rp. 1.000.000.000

**6. Industri Pariwisata**

Selama masa pandemik Covid-19, industri kepariwisataan mengalami keterpurukan, hal ini tergambar dari pendapatan sektor pariwisata, baik dari retribusi objek wisata, jasa hiburan, pajak hotel dan pajak restoran. Pada Tahun 2019 Pendapatan dari 4 sektor ini saja sudah mencapai angka Rp. 5.537.885.501, namun pada tahun 2020 hanya berada pada angka Rp. 3.412.470.944 turun sekitar 38,4%.

Dalam rangka pemulihan, beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu pemberian hibah pariwisata kepada sektor usaha Hotel dan Restoran oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Fasilitasi dan Sertifikasi CHSE, dukungan Promosi dan pemberian pelatihan/penguatan SDM kepada para pelaku usaha pariwisata, dan fasilitasi kemudahan akses permodalan kepada pelaku usaha pariwisata. Sampai dengan kondisi saat ini, terdapat perkembangan yang lebih baik/trend positif terhadap pengelolaan akomodasi maupun usaha pariwisata lainnya.

**7. Bandara, Pelabuhan, Terminal Bus**

Kondisi dan operasional khususnya akses masuk melalui Bandara sudah memadai. Sedangkan pelayanan melalui pelabuhan belum optimal, diharapkan adanya konsep penjualan tiket online, penambahan armada, konektivitas dari Pelabuhan utama ke titik objek (destinasi lainnya). Perlu kesiapan yang sungguh serius dari pengelola angkutan danau (ferry) terutama pada saat tingkat kunjungan tinggi (*high season*). Jadwal armada tidak fleksibel dengan kondisi tertentu. Dan untuk pelayanan terminal bus belum memadai dan perlu pembangunan terminal baru.

**8. Koordinasi antar kementerian/lembaga**

Pemerintah Kabupaten Samosir khususnya melalui Dinas Pariwisata telah melakukan langkah-langkah koordinatif ke kementerian/lembaga antara lain: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.

Khusus usulan-usulan bidang kepariwisataan telah disampaikan kepada dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dalam bentuk dukungan pengembangan 6 Desa Wisata di Kabupaten Samosir untuk selanjutnya diteruskan ke kementerian/Lembaga terkait. Juga dengan menjalin kerjasama dengan

Balai Besar Pelatihan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja di Medan dalam bentuk rencana pelatihan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Samosir.

#### 9. Perubahan Tren Pariwisata

Kondisi pandemi Covid-19 membuat perubahan tren pariwisata, pada saat ini wisatawan lebih cenderung memilih tren *staycation*, *virtual tour*, *adventure*, wisata pedesaan/*rural tourism*, dan secara khusus ke Kabupaten Samosir trennya adalah *self-organized* baik dengan *family tour* maupun dengan *one day trip*.

### B. Permasalahan dan Temuan

1. Lemahnya penegakkan disiplin protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya pemulihan pariwisata di pulau Samosir yang disebabkan oleh kurangnya pelibatan berbagai komunitas dan komponen masyarakat dalam menciptakan kenyamanan berwisata.
2. Besarnya anggaran yang telah dikururkan pemerintah di kawasan Destinasi Superprioritas Danau Toba, belum dapat dirasakan efektivitas dan kemanfaatannya, khususnya di wilayah Kabupaten Samosir.
3. Terbatasnya sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan pariwisata yang ada di kabupaten Samosir dan minimnya dukungan program pelatihan yang bersifat *technical skill* maupun *soft skill*.
4. Kurangnya sinergi antara pemerintah kabupaten Samosir dengan berbagai komunitas masyarakat terkait pengembangan potensi ekowisata dan perlunya pendampingan bagi para pelaku ekonomi yang berbasis produk perkebunan.

### C. Pembahasan

Selama Kunjungan Spesifik Bidang Pariwisata di Kabupaten Samosir, Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, baik unsur Kemenparekraf, pemerintah daerah maupun organisasi pelaku usaha pariwisata, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI, antara lain:

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah daerah Kabupaten Samosir dalam pemulihan kondisi pariwisata di pulau Samosir dengan melibatkan berbagai komunitas dan komponen masyarakat untuk menciptakan kenyamanan berwisata. Namun dalam pandangan Komisi X DPR RI untuk memulihkan pariwisata di wilayah Destinasi superprioritas, diutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar dan penegakkan disiplin protokol kesehatan di destinasi wisata;
2. Upaya Pemerintah (terutama dalam hal ini Kemenparekraf) untuk mempersiapkan pembukaan pariwisata di kawasan Danau Toba patut diapresiasi sebagai upaya untuk segera memulihkan pariwisata yang terdampak pandemi. Namun dalam pandangan Komisi X DPR RI Pemerintah perlu segera mengevaluasi efektivitas program kepariwisataan di kawasan Destinasi Superprioritas Danau Toba mengingat besaran anggaran yang dikururkan pemerintah pusat sangat besar;

3. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata, maka Komisi X DPR RI akan melakukan tindak lanjut terkait usulan dibukanya sekolah atau kampus pariwisata di Kabupaten Samosir.. Komisi X DPR RI meminta kepada Pemerintah agar melakukan kajian yang komprehensif agar upaya peningkatan SDM dibidang pariwisata mendapat dukungan seluruh pemangku kepentingan;
4. Sebagai dukungan pengembangan pariwisata di kawasan Destinasi Superprioritas Danau Toba, khususnya diwilayah Kabupaten Samosir Komisi X DPR RI mendorong upaya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan berbagai komunitas masyarakat yang *concern* terhadap pengembangan ekowisata dan penguatan promosi produk lokal;

#### **D. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan**

1. Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran) Kabupaten Samosir menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan dalam pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba, khususnya di Kabupaten Samosir, diantara adalah;
  - a. menyiapkan sumber daya manusia pengelola pariwisata
  - b. melatih para pelaku pariwisata sampai memiliki kualifikasi keahlian / *certified*
  - c. melakukan studi banding pengelolaan pariwisata, agar *hospitality* di destinasi wisata kab samosir bisa lebih baik.
  - d. Kawasan Danau Toba nampak belum terawat atau tertata dengan baik, terutama penataan dipinggir jalan menuju lokasi destinasi wisata.
  - e. Berupaya agar menghilangkan *image* negatif danau toba sebagai kawasan yang bayak polusi udara
  - f. Mengoptimalkan potensi wisata alam dan mengembangkan wisata budaya dengan atraksi-atraksi, dan membuka area *jogging track* di kawasan wisata.
2. KADIN Kab Samosir (Oliver Simbolon) sekaligus sebagai ketua Komunitas Kopi Sinergi Samosir, menyampaikan beberapa usulan, diantaranya;
  - a. Agar ada peningkatan kualitas jaringan listrik yang saat ini belum kuat.
  - b. Mengoptimalkan fungsi infrastruktur yang sudah tersedia
  - c. Perlu dibangun sekolah/ kampus/ akademi pariwisata di Kabupaten Samosir, agar siswa yang ada tidak harus keluar pulau untuk studi lanjut, dan sebagai upaya memperbaiki SDM pelaku pariwisata lokal.
3. Perwakilan Pelaku Pariwisata (Ibu Manurung) menyampaikan pandangan dan usulan sebagai berikut:
  - a. Kapal feri sudah tersedia/ada, hanya jumlahnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas warga.
  - b. Mengharapkan agar kegiatan sosialisasi sapta pesona atau program dinas pariwisata melibatkan banyak warga, bukan hanya perwakilan.

- c. Perlu difasilitasi berdirinya kantor pembantu imigrasi, agar memudahkan bagi turis wisata mancanegara dalam mengurus perpanjangan izin kunjungan.
  - d. Pentingnya zonasi wisata agar membuat kenyamanan bagi wisatawan maupun bagi warga. Misalnya zona untuk wisata skuter/jetski (yang kerap menimbulkan polusi suara bagi pelajar), zona wisata perkebunan dan perikanan.
  - e. Materi pelatihan bagi pelaku pariwisata tidak hanya terkait *hospitality*, tetapi juga pelatihan peningkatan *technical skill*.
4. Kapolres Kabupaten Samosir menyampaikan upaya-upaya pengamanan kepariwisataan dengan melaksanakan;
- a. Memastikan penegakkan protokol kesehatan (CHSE) di destinasi wisata
  - b. Melaporkan lokasi hiburan yang melanggar aturan dan memberi sanksi, dan berkoordinasi dengan dinas pariwisata terkait penertiban perizinan.
  - c. Bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengatur ketertiban di destinasi wisata.
5. Perwakilan UMKM menyampaikan beberapa usulan dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir, diantaranya;
- a. Potensi pelestarian lobster bisa menjadi daya tarik wisatawan, sekaligus potensi bagi perekonomian warga.
  - b. Menjaga *image* yg baik bagi wisatawan *high class* dengan memberi layanan berupa penyediaan helipad.
  - c. Pentingnya sosialisasi kondisi sosial budaya yang ada di Kabupaten Samosir, terutama dalam promosi pariwisata.
  - d. Berharap agar diselesaikannya persoalan pembangunan perluasan dermaga yg masuk dalam wilayah museum.
  - e. Mengharapkan agar upaya pengembangan pariwisata tidak melupakan eksistensi produk-produk perkebunan, seperti; buah mangga.
  - f. Sangat membutuhkan pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan legalitas produk yang dihasilkan warga local.
  - g. Pengembangan ekowisata dengan mengupayakan dibuatnya kampung *hiking trail*, dan jika memungkinkan membuat Kereta Gantung di kawaan Danau Toba.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari kegiatan yang telah dilaksanakan, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakkan disiplin protokol kesehatan sebagai bagian dari upaya pemulihan pariwisata di pulau Samosir disebabkan oleh kurangnya pelibatan berbagai komunitas dan komponen masyarakat, sehingga berdampak pada kurangnya rasa nyaman dalam berwisata;
2. Pentingnya evaluasi secara berkala terhadap kebijakan pariwisata mengingat besarnya anggaran yang telah dikucurkan pemerintah di

kawasan Destinasi Superprioritas Danau Toba, agar tergambar efektivitas dan kemanfaatan anggaran menjadi lebih jelas terutama di wilayah Kabupaten Samosir;

3. Upaya peningkatan sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Samosir harus didukung oleh semua pemangku kepentingan;
4. Optimalisasi sinergi antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan berbagai komunitas masyarakat terkait pengembangan potensi ekowisata dan perlunya pendampingan bagi para pelaku ekonomi yang berbasis produk perkebunan (sebagai daya dukung pariwisata).

#### **IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melibatkan berbagai komunitas dan komponen masyarakat dalam penegakkan disiplin protokol kesehatan sehingga tercipta kenyamanan berwisata sebagai bagian dari upaya pemulihan pariwisata di wilayah Destinasi superprioritas.
2. Mendorong evaluasi secara komprehensif efektivitas program kepariwisataan di kawasan Destinasi Superprioritas Danau Toba mengingat besaran anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat sangat besar.
3. Mendukung upaya peningkatan SDM dibidang pariwisata sehingga mendapat dukungan seluruh pemangku kepentingan, diantaranya dengan dibukanya sekolah atau kampus pariwisata di Kabupaten Samosir.
4. Mendorong upaya sinergi antara pemerintah Kabupaten Samosir dengan berbagai komunitas masyarakat yang *concern* terhadap pengembangan ekowisata dan penguatan promosi produk lokal, sebagai bagian dari upaya pemulihan Pariwisata.

#### **V. PENUTUP**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ini, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 31 Maret 2021

**Ketua Tim,**

**Ttd.**  
**Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol**  
**A-539**